



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 789/IX/2013

IV/SEPTEMBER 2013



**THE 34th GENERAL ASSEMBLY
ASEAN INTER-PARLIAMETARY ASSEMBLY**

17th - 23rd SEPTEMBER 2013

BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM

"The Role of AIPA in Realising The ASEAN Community"



Sukseskan Komunitas ASEAN 2015

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT SEPTEMBER 2013

Minggu keempat bulan September, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna 24 September 2013 mengenai Hasil Pembahasan Komisi III tentang Calon Hakim Agung dilanjutkan dengan penetapan, rapat-rapat Panja BPJS di Komisi IX, rapat-rapat Baleg mengenai RUU MD3 dan RUU Pilpres, serta kegiatan lanjutan Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam.

Berikut ringkasannya:

Rapat Paripurna 24 September

Ketua Komisi III DPR-RI melaporkan mengenai hasil seleksi calon Hakim Agung. Dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, berjumlah dua orang dan dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan 23 September. Setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan selesai, maka Komisi III telah memilih empat orang calon Hakim Agung diantara duabelas calon, melalui suara terbanyak. Keempat calon tersebut yaitu; [1] Zahrul Rabain., SH.,MH. [2] Eddy Army H., SH., MH. [3] Sumardijatmo., SH., MH. [4] Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., Mum.

Keempat calon Hakim Agung tersebut disetujui rapat Paripurna DPR yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Keputusan Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Komisi III menghargai dan menyadari, bahwa duabelas calon Hakim Agung yang disampaikan Komisi Yudisial adalah orang-orang terbaik, yang dianggap baik untuk duduk sebagai Hakim Agung. Komisi III menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas dan moral calon Hakim Agung merupakan prasyarat penting bagi Hakim Agung. Oleh karenanya, komisi III mengutamakan kualitas calon Hakim Agung yang terdiri dari integritas, visi dan misi, serta kompetensi. Diharapkan calon Hakim Agung terpilih dapat menjadi Hakim Agung yang mampu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Kegiatan Panja BPJS Komisi IX DPR-RI

Dalam RDP Panja BPJS Komisi IX DPR-RI dengan Dirut PT Askes, Dirut PT Jamsostek dan Dirut PT Asabri, ada beberapa acara yang dibahas bersama, antara lain; [1]. Progress Pengalihan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek dan Program Kesehatan Anggota TNI/Polri ke BPJS Kesehatan, [2]. Persiapan mekanisme pengumpulan iuran peserta BPJS dan mekanisme pembayaran klaim kepada pemberi pelayanan kesehatan, dan [3]. Persiapan mekanisme kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Panja BPJS Komisi IX DPR-RI memberikan apresiasi terhadap paparan kinerja yang disampaikan oleh ketiga PT di atas yang selanjutnya menjadi bahan masukan bagi Panja dalam perumusan rekomendasi Panja. Terkait

dengan regulasi BPJS Kesehatan, PT Askes memaparkan bahwa; *pertama*, turunan regulasi yang penting untuk segera direalisasikan adalah: [1]. Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, [2]. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BJPS Kesehatan dan DJS Kesehatan. *Kedua*, percepatan regulasi BPJS Kesehatan yang masih dalam progress ada empat Peraturan Pemerintah, empat Peraturan Presiden, dua Permenkes, satu Peraturan BPJS dan Penyusunan Pedoman/SOP BPJS Kesehatan.

Sedangkan penjelasan PT Jamsostek terkait dengan sistem pengalihan aset liabilities dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan adalah; PT Jamsostek dan PT Askes telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Proses pengalihan Aset dan Liabilities Program JPK ke BPJS Kesehatan yang ditanda tangani pada tanggal 7 Maret 2013 dan telah dipaparkan lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Teknis Pengalihan. Dalam proses pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ke BPJS Kesehatan, tidak ada pengurangan Karyawan Jamsostek yang menangani JPK karena mereka akan diberdayakan untuk menjadi petugas yang menangani Program Jaminan terutama Kelelakaan Kerja.

Terkait kendala dari program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan adalah Peraturan Pemerintah yang belum selesai. Misal, peraturan mengenai persentase iuran pengusaha dan tenaga kerja serta juknisnya. Sedangkan solusi dari kendala tersebut adalah; melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan membuat perencanaan sosialisasi dengan pengusaha dan tenaga kerja.

Rapat Komisi III tentang Penetapan Calon Ketua Baru Komisi

Pada minggu keempat di bulan September ini, terdapat rapat internal Komisi III tanggal 24 September 2013 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso mengenai pencalonan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III. Pada rapat tersebut, semua fraksi ada dan hadir 40 orang dari 53 orang anggota, sehingga dinyatakan sudah memenuhi *quorum*. Rapat pelantikan berakhir dengan keputusan Priyo Budi Santoso untuk memberikan kesempatan satu minggu kepada pimpinan Fraksi Demokrat guna mengajukan calon lain yang ditugaskan sebagai Ketua Komisi III. Voting akan dilakukan jika pimpinan Fraksi Demokrat tetap mengajukan nama Ruhut. Namun jika yang diajukan adalah calon lain, maka figur tersebut akan langsung dilantik menjadi Ketua Komisi III. Sementara itu, Priyo Budi Santoso mengatakan selama belum ada pelantikan Ketua Komisi III DPR-RI, I Gede Pasek Suardika tetap sebagai Ketua Komisi III DPR.

Rapat Tim Pengawas Panitia Angket Bank Century

Rapat Tim Pengawas terhadap Tindak lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Pengusutan Kasus Bank Century dihadiri Menteri Keuangan RI; Dewan Komisiner LPS; Direktur Utama Bank Mutiara dan Forum Nasabah Bank Century. Acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso tersebut mengagendakan dua acara, yaitu; penjelasan mengenai skema penggantian Dana Nasabah Antaboga, dan laporan Kinerja Bank Mutiara. Dalam Rapat Kerja Tim Pengawas Century tanggal 18 September 2013 yang dihadiri Sekjen Kementerian Keuangan RI, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Direktur Utama Bank Mutiara menyatakan sanggup melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2838 K/PDT/2011, tanggal 19 April 2012, serta akan menyampaikan Skema Pengembalian Dana Nasabah Antaboga Delta Sekuritas, pada pertemuan tanggal 2 Oktober 2013.



Diplomasi Parlemen

Pada Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam, Ketua DPR-RI Dr.H.Marzuki Alie menyampaikan dalam pidatonya bahwa DPR-RI ingin berperan aktif dalam sidang AIPA dengan menambah beberapa agenda item di Komisi ekonomi dan Komisi Sosial. Pada isu ekonomi, Indonesia mengusulkan dua agenda item baru dengan tema “*The Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community*” dan “*The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sectors*”.

Marzuki Alie menekankan kembali komitmen Indonesia secara penuh dan mendukung integrasi ekonomi regional. Gap pembangunan antara negara-negara ASEAN masih terjadi dan Indonesia perlu menekankan pada kebutuhan masyarakat ASEAN guna memberi dukungan pada peningkatan persaingan secara positif di level pasar regional dan internasional. Kerjasama dan kemungkinan untuk peningkatan AIPA yang lebih baik perlu dilakukan untuk menciptakan komunitas ASEAN. AIPA juga perlu menyoroti pentingnya kontribusi sektor usaha dalam pencapaian pemenuhan hak asasi manusia secara komprehensif terutama menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi seperti yang tercantum dalam *UN Convention of Economic Social and Cultural Rights*. Namun, karena keterbatasan waktu dan kesiapan materi bagi para delegasi, Indonesia menerima usulan agar tema “*The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sectors*” dapat diagendakan pada Sidang AIPA tahun depan di Laos.

Pada komisi sosial, delegasi Indonesia mengajukan item “*Post 2015 Development Agenda : AIPA's Commitment in Countering the Rising Challenges*”. Indonesia menyadari bahwa target pencapaian MDG's 2015 sudah semakin dekat. Ada sejumlah target yang telah diraih oleh Asia Tenggara, seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta sejumlah target yang belum tercapai. Ketua DPR-RI juga menyatakan bahwa Indonesia tetap menaruh konsentrasi pada pengurangan Angka Kematian Ibu dan Anak, sesuai dengan tema pertemuan WAIPA yaitu “*Advocating Maternal and Child Health in ASEAN*”. **



Sukseskan Komunitas ASEAN 2015

Pada Sidang Umum AIPA ke-34, Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan pentingnya dukungan semua pihak untuk menyukseskan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang berlandaskan pada nilai-nilai perdamaian, saling menghargai, persaudaraan, dan kerjasama. Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyampaikan dukungan kepada Parlemen Timor Leste untuk menjadi salah satu observer AIPA, yang tentunya dapat memperkaya upaya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam sidang itu, Delegasi Parlemen Indonesia mengajukan dua draft resolusi, yaitu *'Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community and Supporting Green Growth'* dan *'The Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda'*.

Delegasi Indonesia menganggap kedua agenda tersebut sebagai isu yang krusial, khususnya dalam menghadapi rencana pembentukan Komunitas ASEAN yang akan berlangsung kurang dari 1,5 tahun lagi. Kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN dapat menyebabkan ketimpangan dalam mekanisme integrasi regional juga menjadi sorotan Delegasi Indonesia.

Isu lainnya yang ditekankan oleh Delegasi DPR RI adalah mengenai komitmen pembangunan pasca 2015 yang ber-

landaskan pada target pencapaian MDGs. Dinamika sistem internasional yang sedang terjadi, menyebabkan tantangan untuk menuju pembangunan berkelanjutan juga semakin kompleks.

Sementara itu, dalam sidang komisi politik, Anggota BKSAP DPR Muhammad Oheo Sinapoy mengkritisi isu-isu keamanan yang dibahas selama berlangsungnya pertemuan. Ia mengajukan usulan agar Draft Resolusi yang berjudul *'Supporting the ASEAN Political Security Community'* juga mengakomodasi mengenai tantangan bidang politik-keamanan yang semakin kompleks, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional.

Sidang Umum AIPA ke-34 diadakan di Brunei Darussalam, dan berlangsung pada 17 hingga 23 September 2013. Tema

yang diangkat adalah 'The Role of AIPA in Realizing ASEAN Community'. Delegasi DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

Selain itu, Delegasi Parlemen Indonesia lainnya adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat, serta Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya. Sedangkan dari anggota BKSAP diantaranya Atte Sugandi, Ida Ria Simamora, Muhammad Oheo Sinapoy, Selina Gita, Nazarudin Kiemas, Vanda Sarundajang, Okky Asokawati, Iskan Qolba Lubis, dan Marwan Ja'far.

Acara tersebut dihadiri oleh 10 (sepuluh) Perwakilan Parlemen Anggota AIPA, yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta sejumlah Delegasi dari Parlemen negara-negara peninjau (*observer countries*), termasuk diantaranya Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, dan Federasi Rusia.

Secara keseluruhan, Sidang Umum AIPA ke-34 telah menghasilkan dan menyetujui 26 resolusi, yaitu: *Supporting the ASEAN Political Security Community; Fostering the*



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat dan Anggota BKSAP Muhammad Oheo Sinapoy.

Growth and Sustainable Development of SMEs (Small Medium Enterprise); Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community and Supporting Green Growth; Nurturing the Role of Young People for the Future Challenges of ASEAN; Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda; Cooperation toward Child Abuse Free ASEAN; Advocating Maternal and Child Health in ASEAN serta 19 resolusi yang berkaitan dengan keorganisasian dan *Joint Communiqué* yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Delegasi. (sf,hr) Foto: eka hindra/parle.

Tingkat Minat Baca Masih Rendah

Anggota Komisi X Irsal Yunus menilai minat baca di Indonesia masih rendah. Padahal, menurutnya, minat baca ini turut menentukan kemampuan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia Indonesia.

"Jika kita sudah menemukan cara untuk meningkatkan minat baca, itu hasilnya akan sangat mengagumkan. Selama ini kita belum berpikir untuk meningkatkan minat baca, urusannya selalu buku dan gedung," ujar Irsal ketika melakukan RDP dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Sri Sularsih, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (23/09).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, persoalan minat baca ini tak pernah terselesaikan. Ia mengingatkan, ada dua tugas utama PNRI, yaitu meningkatkan minat baca dan mengisi perpustakaan dengan buku-buku yang mempunyai nilai untuk bangsa. "Ini misi Perpustakaan Nasional yang paling kuat," imbuh Irsal.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X Muslim. Ia menilai, mungkin



Anggota Komisi X DPR Irsal Yunus.

diperlukan perubahan pola maupun strategi, sehingga masyarakat memiliki ketertarikan minat baca ke Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Daerah.

"Bantuan buku ke Lapas, kenapa tidak diarahkan ke Rumah Pintar? Ada Mobil Pintar, tapi terbatas. Kalau Rumah Pintar bisa kita dorong di beberapa lokasi, apalagi untuk daerah tertinggal, terluar, maupun terpencil, ini sangat positif," ujar Muslim.

Dalam RDP ini, Komisi X menyetujui sisa anggaran gedung fasilitas layanan PNRI sebesar Rp 92 miliar direalokasi ke beberapa program kegiatan seperti memberikan bantuan buku untuk perpustakaan di daerah, komunitas dan pesantren, serta pengembangan minat baca.

Namun, walaupun menyetujui usulan tersebut, Komisi X mendesak PNRI untuk mengajukan usul revisi pengalokasian anggaran untuk program baru tersebut. Selain itu, PNRI juga perlu melaporkan program Perpustakaan Nasional yang sudah berjalan saat ini dengan membandingkan program kegiatan yang diusulkan.

"Alokasi anggaran untuk program/kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, daerah yang dibantu, komunitas, pesantren, Lapas, rumah pintar. Komisi X meminta PNRI meningkatkan gemar membaca dan meningkatkan sosialisasi minat baca dengan persiapan yang baik," jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri, ketika memimpin RDP. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

Pemerintah Ingin Menang Sendiri



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

Anggota Komisi I Tantowi Yahya menyatakan pemerintah selalu ingin menang sendiri. Peralnya, dari hasil persandingan dua draft RUU yaitu, RUU dari Pemerintah dengan draft RUU Penyiaran Pemerintah usul inisiatif DPR, dapat diketahui hanya 226 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari

keseluruhan 858 DIM RUU Penyiaran yang disepakati pemerintah.

“Seperti kembali ke jaman dulu. Pemerintah benar-benar dominan. Sifat ingin menang sendiri pemerintah terlihat dari dibuangnya pasal-pasal yang mendukung supremasi sipil dalam draft RUU Penyiaran versi pemerintah,” kata Tantowi di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Senin (23/09).

Pada Raker dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiqi tersebut, hadir Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum & HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan.

Tantowi melihat, terdapat perbedaan mencolok antara draft RUU Penyiaran usul inisiatif DPR dengan draft sandingan dari pemerintah. Perbedaan itu terlihat pada RUU Penyiaran Pemerintah yang masih memasukkan penyiaran nasional, sedangkan RUU Penyiaran versi DPR menegaskan adanya kewajiban untuk bersiaran dengan sistem berjarangan.

Perbedaan mendasar lainnya adalah disebutkan pada RUU Penyiaran versi pemerintah pasal 6 ayat (1) Penyiaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan pada RUU Penyiaran Draft versi DPR pasal 7 ayat (4) disebutkan Penyelenggara Penyiaran meliputi Pemerintah dan KPI. (sf)/foto:iwan armianas/parle.

Komisi VIII Minta Anggaran Itjen Kemenag Ditambah

Anggota Komisi VIII DPR RI minta tambahan 0,5 Persen Anggaran Kementerian Agama untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII MH Said Abdullah dalam RDP dengan Sekjen, Irjen dan Seluruh Dirjen di Kementerian Agama RI pada Senin (23/9). Dikatakan Said, selama ini Itjen sebagai pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama mendapatkan anggaran paling kecil, yaitu sebesar 148 Miliar dari 49 Triliun Anggaran yang diperoleh Kementerian Agama.

“Apa yang bisa diperbuat oleh Itjen dengan anggaran sebesar itu dan dengan jumlah SDM di Itjen yang masih sangat minim. Ini tidak fair. Sayang sekali kita punya Itjen Kementerian Agama sekualitas Pak Yasin yang mantan anggota KPK yang ruang geraknya malah terperangkap hanya karena perso-



Anggota Komisi VIII DPR MH Said Abdullah.

alan anggaran,” jelas Said.

Disini Said melihat belum adanya keinginan politik atau *political will* dari pemerintah untuk menciptakan kementerian yang *akuntable*, transparan dan bersih. Sehingga seperti sengaja mempersempit ruang gerak Itjen dengan pemberian anggaran yang minim. Padahal fungsi dan tugas Itjen memastikan bahwa Kementerian Agama mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan pelayanan prima di bidang keagamaan, mulai dari perencanaan, pelaksana, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan itu jelas tidak sedikit dan tidak mudah.

“Dengan alasan itulah kami meminta agar anggaran untuk Itjen ditambah, menjadi 0,5 persen dari keseluruhan anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama. Hal tersebut demi tercapainya kinerja Itjen yang prima dan sesuai harapan,” tegasnya. (Ayu)/foto:rizka/parle/iw.

GKSB DPR Terima Kunjungan Parlemen Perancis

Permasalahan *illegal logging* menjadi salah satu topic pembicaraan saat GKSB (Group Kerjasama bilateral) BKSAP DPR RI menerima kunjungan Parlemen Perancis di gedung DPR RI, Senayan pada Selasa (24/9).

“Makin lama hubungan Indonesia dengan Perancis makin erat. Namun memang masih ada yang perlu diperjelas lagi. Salah satunya permasalahan *illegal logging*,” jelas Fauzi Ahmad, Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Perancis.

Ditambahkan anggota BKSAP DPR RI, Muhammad Oheo Sinapoy, dalam *Voluntary Partnership Agreement* adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh semua negara yang terkait dengan *illegal logging*. Namun sayangnya Parlemen Eropa belum menandatangani hal tersebut.

“Kita melihat parlemen Eropa main-main dengan kita. Dengan Malaysia parlemen Eropa sudah menandatangani, tapi dengan kita belum,” ungkap Sinapoy.

Apoy menduga hal tersebut dikarenakan selama ini tidak sedikit kayu yang berasal dari Indonesia, khususnya Sumatera yang dibalak secara liar masuk ke Malaysia. Dan oleh Malaysia kayu hasil *illegal logging* itu dikirim ke Eropa.



GKSB DPR dan BKSAP DPR berfoto bersama Parlemen Perancis.

Dengan kata lain, ditambahkan Apoy, Eropa selama ini menggunakan kayu-kayu dari Sabah, Malaysia yang hasil *illegal logging* dari negara kita. Oleh karena itulah Apoy ingin agar Eropa menandatangani kesepakatan tersebut, selain tentunya di dalamnya ada negara tetangga kita, Malaysia juga.”

“Kalau Sabah dan Serawak tidak dimasukkan, kayu kita akan habis disitu semua. Itu yang menurut saya Uni Eropa ini sepertinya ingin main-main dengan kita. Mereka bersuara menjaga *eviroment* tapi masih tetap

mau terima kayu *illegal logging* dari Malaysia yang kayunya berasal dari Indonesia,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Apoy bukan tanpa sebab, mengingat sudah sejak lima tahun yang lalu *draft* perjanjian sudah dikirimkan, namun belum ditandatangani dengan alasan masih diterjemahkan.

“Masa menerjemahkan selama lima tahun lebih. Untuk permasalahan ini kita akan mengambil langkah-langkah politik,” tegas Apoy yang juga anggota Komisi I DPR RI. (Ayu) Foto: *od/parle*.

Azam Azman Gantikan Benny K. Harman

Azam Azman Natawijaya (F-PD) kini resmi menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menggantikan Benny K Harman. Sementara formasi pimpinan lainnya tidak mengalami perubahan. Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo melantiknya pada Selasa, (24/9).

Seperti diketahui, formasi pimpinan Komisi VI DPR tetap diketuai Airlangga Hartarto (F-PG), Aria Bima (F-PDI Per-

juangan), dan Erik Satria Wardhana (F-Hanura). Pengangkatan Azam sebagai wakil ketua yang baru disambut baik oleh semua anggota Komisi VI. Ini jadi penyegaran dan menghangatkan suasana baru.

Sebagai anggota Komisi VI, Azam termasuk kritis bila berhadapan dengan para mitra kerjanya. Dan Azam lebih menitikberatkan perhatiannya pada BUMN. Para anggota



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Natawijaya mendapatkan ucapan selamat dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Komisi VI yang dimintai komentarnya, mengatakan, ada motivasi baru yang menyemangati kerja Komisi VI ini.

Haeruman Harahap (F-PG), misalnya, menilai Azam sangat kritis dan vokal saat menjadi anggota. Kini, walaupun sudah resmi diangkat sebagai wakil ketua, mestinya daya kritis itu tidak hilang. Hanya saja, sebagai pimpinan, ia tak bisa lagi luluasa bicara. Ketika sudah jadi pimpinan, ia hanya mengatur lalu lintas pembicaraan dalam rapat.

Spesialisasi Azam di bidang BUMN, kata Haeruman, diharapkan bisa meningkatkan kontrol Komisi VI terhadap BUMN. Apalagi, saat ini beberapa Dirut BUMN sedang mengajukan *judicial review* ke MK soal pemisahan kekayaan BUMN dari negara. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Michael Watimena Pimpin Komisi V DPR

Fraksi Partai Demokrat kembali mengalami rotasi, untuk Komisi V DPR Michael Watimena menggantikan Mulyadi menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat dan PDT.

Rapat pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, diapit oleh Pimpinan Lainnya, seperti Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, Lasarus, Muhidin Said.

Dalam sambutannya, Pramono mengharapkan Komisi V DPR tetap kompak dan menjaga soliditas dalam meningkatkan fungsi Dewan.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR terpilih Michael Watimena mengatakan, jabatan ini merupakan amanah dan sebuah kepercayaan dari Partai. "Saya wajib menjalankan secara bertanggung jawab amanah ini," kata Michael Watimena.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyerahkan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi V yang baru

Menurutnya, tugas pertama yang akan dilakukan oleh politisi asal Papua Barat adalah melanjutkan tugas dari pendahulunya, Mulyadi. "Saya akan melanjutkan apa yang dilakukan Mulyadi. Tahun keempat ini akan terus berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI sehingga seluruh program yang ada di komisi akan terlaksana dengan baik,"ujarnya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.

Penetapan Ketua Komisi III Ditunda



Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika berdialog dengan calon Ketua Komisi III Ruhut Sitompul.

Proses pergantian Ketua Komisi III dari Gede Pasek Suardika kepada calon baru yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berlangsung alot. Sejumlah anggota menyatakan menggunakan haknya sesuai tata tertib untuk menolak calon yang diusulkan dan meminta diganti dengan kandidat lain.

“Kami anggota punya ruang untuk menolak. Komisi III ini penuh dinamika, ini strategis soal hukum yang perlu dipimpin oleh orang yang punya kapabilitas. Kami tidak ingin komisi III menjadi komisi dagelan, badut. Atas nama Fraksi Hanura kami menolak sau-

dara Ruhut,” kata Syarifuddin Sudding anggota Komisi III dari FP Hanura dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/13).

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS Abu Bakar Alhabsy mengatakan tidak mempermasalahkan apabila komisi bidang hukum ini dipimpin oleh Ruhut. Akan tetapi menurutnya akan berat apabila terpilih dalam posisi sebagian besar menolak. Ia kemudian mengusulkan agar surat dari FPD dikembalikan dan mencari kandidat lain yang bisa diterima semua pihak.

Pandangan ini dimentahkan oleh

Taslim dari FPAN. “Kami mengusulkan agar dilakukan lobi antar fraksi, apabila tidak ditemukan kata sepakat kita laksanakan mekanisme berikutnya yang diatur dalam tata tertib, pemungutan suara,” tandasnya.

Pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyetujui usul ini dan men-skor rapat untuk memberi kesempatan kepada seluruh fraksi mencari titik temu. Dalam lobi disepakati untuk memberi waktu 1 minggu kepada FPD untuk mempertimbangkan kembali usulannya.

“Atas nama rapat saya segera telepon Ibu Nurhayati Ali Assegaf (Ketua FPD-red). Kita beri kesempatan kepada beliau untuk melaporkan kepada DPP atau bahkan Pak SBY nanti mengirimkan kembali surat meskipun kita sudah tahu mungkin calonnya tetap, tapi saya tidak mau mengomentari. Surat itu kita akan bahas minggu depan, kita jadwalkan dalam waktu yang kita tentukan kemudian,” paparnya.

Putusan ini akhirnya disepakati oleh seluruh peserta sidang. Dalam kesempatan itu Priyo juga menegaskan selama proses ini berlangsung maka Pimpinan Komisi III tidak berubah. “Perhari ini pimpinan Komisi III masih sah, Pak Pasek tetap Ketua, sampai pemberitahuan lebih lanjut,” demikian Priyo. (iky)/foto:wy/parle/iw.

4 Hakim Agung Ditetapkan Dalam Sidang Paripurna DPR



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berfoto bersama 4 Hakim Agung terpilih.

Sidang Paripurna DPR RI menerima secara bulat laporan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung yang telah dilakukan Komisi III. 4 Hakim Agung terpilih ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk proses pengangkatan.

“Dari meja pimpinan saya sampaikan penghargaan kepada Komisi III dan Ketuaanya Gede Pasek Suardika,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat memimpin jalannya sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/13).

Tepek tangan membahana di ruang sidang terutama

disampaikan kepada Pasek yang akan segera mengakhiri tugasnya sebagai Ketua Komisi III. Turun dari mimbar usai membacakan laporan ia membalas sambutan itu dengan lambaian kepada peserta sidang.

Sebelumnya dalam laporannya Pasek juga menyampaikan harapan agar 4 Hakim Agung terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik dan bekerja meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung. “Kami harapkan calon hakim agung terpilih mampu meningkatkan citra dan wibawa MA sehingga lembaga peradilan tertinggi ini bisa menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan,” tegasnya.

Ia juga menyebut dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III mengutamakan kualitas hakim agung meliputi integritas, visi dan misi serta kompetensi. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini secara khusus menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan dari publik sehingga seluruh proses pemilihan berjalan lancar.

Pada bagian akhir penetapan, pimpinan sidang meminta 4 Hakim Agung terpilih tampil dan diperkenalkan di depan peserta sidang paripurna. Mereka adalah, Zahrul Rabain, SH., MH, H. Eddy Army, SH. MH, Sumardijatmo, SH., MH dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. (iky)/foto:odjie/parle/iw

Penyuapan Merupakan Pelanggaran Berat



Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR
Siswono Yudo Husodo.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudo Husodo menyatakan anggota DPR yang terlibat kasus penyuapan, dapat melanggar tata tertib

dan etika. Sanksinya, anggota dewan bisa diberhentikan dari keanggotaan DPR.

“Kalau sampai terjadi penyuapan, itu akan melanggar etika, dan sanksinya akan diberhentikan dari keanggotaan DPR. Anggota DPR seharusnya bertindak bersih dari suap,” tegas Siswono saat ditemui di Gedung Nusantara II, Selasa (24/09).

Politisi Golkar ini juga menanggapi pemberitaan tentang ‘lobi toilet’ pada saat fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi III. Menurutnya, kejadian ini harus diselidiki secara mendalam terlebih dahulu, bukan langsung menjatuhkan sanksi.

“Kita tidak mungkin mengambil tindakan tanpa melakukan penyelidikan secara mendalam. Kita mau tahu dulu dari yang melihat (kejadian) ini. Yang dilihat wartawan itu selembar kertas atau amplop? Setelah kita tahu dari wartawannya, yang bersangkutan (Anggota DPR dan calon Hakim Agung) akan kita panggil,” imbuh Siswono.

Politisi yang juga Anggota Komisi IV ini menyatakan BK akan melakukan penyelidikan terhadap wartawan itu, dan kemudian memanggilnya untuk memberikan penjelasan. “Kita tidak mungkin terus mengambil suatu sanksi terhadap berita yang kita terima begitu saja,” tutup Siswono. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

DPR Ketar-ketir Lihat Persiapan BPJS

Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan tinggal 3 bulan lagi. Belum terlihat persiapan yang signifikan menyambut dimulainya jaminan kesehatan masyarakat lewat BPJS pada 1 Januari 2014.

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengkhawatirkan pelaksanaan program kesehatan ini. “Saya sadar bahwa sisa waktu berlakunya BPJS

ini masih jauh dari sempurna. Pasti babak belur. Tapi, paling tidak kita sudah berada di track yang betul. DPR sebenarnya cukup ketar ketir melihat kesiapan BPJS ini,” ungkap Okky yang ditemui Selasa, (24/9).

Seperti diketahui, salah satu program BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan PT. Askes ditunjuk untuk menyukseskan pelaksanaan JKN ini. Peserta JKN saat ini saja mencapai

sekitar 150 juta jiwa yang dikhususkan melayani kesehatan rakyat kecil. Dari banyaknya peserta JKN tersebut, dibutuhkan sekitar 33 ribu layanan kesehatan primer, baik puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga dokter keluarga.

Namun, yang baru bisa direkrut PT. Askes hanya 15 ribu layanan kesehatan primer. Dengan adanya program JKN ini, Okky berharap, bisa merubah



mindset para tenaga medis untuk lebih fokus melayani kesehatan masyarakat. Tidak lagi memikirkan dana yang harus dikeluarkan pasien. Hanya saja, memang, masih ada sedikit masalah dalam program JKN oleh PT Askes tersebut.

Menurut Okky, masalahnya adalah pada perbedaan kelas di rumah sakit. PT. Askes melayani juga para pejabat eselon I dan II. Tentu kelasnya berbeda saat masuk rumah sakit. Bila kelasnya sudah dibedakan seperti itu, pelayanan dari para tenaga medis juga akan berbeda. Semakin elit kelasnya, semakin meningkat pelayanannya. Sebetulnya, jelas Okky, dalam program BPJS semua

lapisan masyarakat mestinya menerima pelayanan dan kelas yang sama, yaitu kelas III.

“Dalam BPJS itu semua sama, kelas III. Tapi, hasil RDP untuk besarnya iuran ada perbedaan, yaitu kelas III, II, dan I. Artinya, kalau ada perbedaan iuran, karena adanya perbedaan kelas, itu besar kemungkinan ada perbedaan senyum dari tenaga-tenaga kesehatan,” tandas anggota F-PPP itu. Amanat UU BPJS, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan pelayanan.

“Kalau dulu ikut Askes dilayani di kelas II, ketika BPJS, dia juga harus di kelas II. Itu amanat UU. Tidak boleh ada



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati.

pengurangan pelayanan. Penambahan boleh, tapi pengurangan tidak boleh.”
(mh)/foto:iwan armanias/parle.

Budi Mulya Mangkir, Timwas Undang Lagi Pekan Depan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Budi Mulya tersangka dalam kasus *bailout* Bank Century tak penuhi undangan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI. Agenda rapat Timwas, Rabu (25/9), sedianya akan mendengarkan keterangan tunggal dari Budi Mulya.

Budi Mulya berkirim surat resmi yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI tentang ketidakhadirannya itu. Surat tersebut baru diterima Timwas di akhir rapat. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat, membacakan isi surat Budi Mulya. Alasannya, karena ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus *bailout* Bank Century, ia punya hak untuk tidak menghadiri panggilan Timwas.

Dalam suratnya, Budi Mulya berargumentasi bahwa berdasarkan UU Kehakiman Pasal 3 ayat (2), dinyatakan, “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali yang diatur dalam UUD 1945.” Atas dasar itulah, mantan Deputy Senior BI ini tak

mau menghadiri undangan Timwas.

Para anggota Timwas yang hadir tak sependapat dengan argumen Budi Mulya dalam suratnya itu. Beberapa anggota Timwas menilai, DPR tetap berhak meminta keterangan dari Budi Mulya. Apalagi UU Kehakiman tersebut juga dibuat oleh DPR. Sebagian anggota Timwas lainnya menilai, ada yang sengaja mengulur-ulur waktu dan memperlambat kerja Timwas. Padahal, kerja Timwas akan segera berakhir.

Akhirnya, rapat memutuskan akan kembali memanggil Budi Mulya pada tanggal 2 Oktober 2013. Selain Budi Mulya, rapat Timwas minggu depan juga akan menghadirkan direksi Bank Mutiara dan LPS. (mh)/foto:wahyu/parle/iv.

Iran Minta DPR Berperan Aktif Selesaikan Konflik Suriah

Iran meminta Parlemen Indonesia berperan aktif untuk menyelesaikan konflik Suriah yang tidak kunjung usai. Hal tersebut dikemukakan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farzandeh saat menemui Ketua DPR Marzuki Ali, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (25/9).

“Kita ingin mengadakan kerjasama antar kedua negara, yang menjadi perhatian kerjasama krisis Suriah yang tak

kunjung usai. Kebijakan arogan dan anarkis membuat kehancuran negara Suriah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Duta Besar Iran menyampaikan bahwa Komisi II Parlemen Iran dan Group Kerjasama Bilateral Iran akan mengunjungi Indonesia. Menurutnya, Kunjungan tersebut bertujuan untuk saling tukar pendapat dengan DPR RI terkait persoalan tata kelola pemerintahan.

“Kita juga ingin mendorong kerjasama Internasional dan ekonomi, selain itu diperlukan langkah kongkret kedua belah pihak untuk merealisasikan kerjasama itu,” jelasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung perlunya langkah kongkret dalam meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Selain itu, dirinya mengharapkan Presiden Iran terpilih akan membawa hubungan kerjasama lebih erat dan suasana yang semakin damai. “Saya yakin Presiden Iran yang baru lebih moderat dan barat akan menerimanya serta kondisi dunia akan semakin baik,” tandasnya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazandeh.

Komisi IX DPR RI Menerima Usulan Anggaran Tiga Ditjen Kemenakertrans



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno.

Komisi IX DPR RI menerima usulan anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Ditjen PHI dan Jamsos), Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan (Ditjen PPK), dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat dengar penda-

pat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI dan Jamsos, Dirjen PPK, dan Dirjen Binalattas Kemenakertrans dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9)

“Komisi IX DPR RI dapat menerima usulan anggaran tersebut, dan akan diperjuangkan di Badan Anggaran DPR RI,” kata Supriyatno.

Usulan anggaran ketiga direktorat tersebut sebagai berikut :

- Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans Tahun 2014 sebesar Rp 360.235.500.000,- dan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 76.598.378.000.
- Ditjen PPK Kemenakertrans Tahun 2014 sebesar Rp 338.553.800.000,-.
- Ditjen Binalattas Kemenakertrans Tahun 2014 sebesar Rp 643.258.759.000,- dan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 1.028.530.443.070,-

Komisi IX DPR RI juga meminta ketiga Direktorat Jenderal Kemenakertrans tersebut, untuk memperhatikan dan merealisasikan masukan-masukan yang berbasis program masyarakat dan pedesaan seperti yang disampaikan anggota Komisi IX, terkait pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Ditjen PHI dan Jamsos, Ditjen Binalattas dan Ditjen PPK Kemenakertrans Tahun 2014. (sc)/foto:odjie/parle.

Panja RUU Amandemen MD3 Sepakati Menambah Dua Tugas MPR

Panitia Kerja RUU Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3) menyepakati untuk menambah dua tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Kedua tugas MPR tersebut yaitu menerima dan mendengarkan laporan kinerja lembaga negara yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945, dan memasyarakatkan ketetapan MPR yang masih berlaku,” kata Ketua Panja RUU MD3, Ana Muawanah saat melaporkan hasil Panja pada Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).

Selain itu, kata Ana yang juga Wakil Ketua Baleg, Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI disampaikan dalam sidang MPR setiap tanggal 16 Agustus. Hal ini sebelumnya, dilaksanakan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

“Kemudian pengelolaan anggaran MPR, Panja menyepakati perlu dilapor-



Ketua Panja RUU MD3 Ana Muawanah berbincang dengan Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan Fahri Hamzah.

kan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN,” tegas Ana.

Mengenai tata cara pemilihan dan penggantian pimpinan MPR, sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 117/

PUU-VII/2009 yang menyebabkan sistem 1 paket dan representatif fraksi tidak sejalan dengan konstitusi, Panja sepakat bahwa pemilihan dan penggantian pimpinan MPR dilakukan dari dan oleh anggota MPR yang berasal dari Fraksi dan kelompok anggota. (sc) foto:odjie/parle/iw.

Komisi V Kagumi Lokomotif Produksi PT Inka



Tim Komisi V saat meninjau salah satu produk PT INKA di Madiun, Jawa Timur.

Anggota tim kunjungan spesifik Komisi V DPR RI mengagumi lokomotif produksi PT. INKA (Industri Kereta Api) yang dinilai memiliki sejumlah kelebihan. Karya anak bangsa yang masih dalam tahap uji kelayakan ini diharapkan dapat menjadi andalan pengembangan transportasi kereta api di dalam negeri.

“Kita bangga dan mendorong PT. INKA dapat segera menyelesaikan proses pengujian dan memperoleh sertifikasi. Kalau loko ini sudah memenuhi standar internasional kenapa kita harus beli ke luar negeri,” kata anggota Komisi V Agung Budi Santoso saat mengunjungi pabrik PT. INKA di Madiun, Jawa Timur, Rabu (26/9/13).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap komponen lokal pada lokomotif Diesel Hidrolik CC 300 yang saat ini masih sekitar 40 persen dapat terus ditingkatkan. Salah satu kesempatan baik untuk meningkatkan kemampuan PT. INKA adalah menjalin kerja sama dengan General Electric Amerika yang saat ini sedang menggarap proyek pengadaan 150 lokomotif untuk PT. KAI.

“Pemerintah harus mendorong agar dalam proses pembelian itu ada klausul kerja sama saling menguntungkan dengan industri kita sendiri misalnya kerja sama produksi, dan alih teknologi,” lanjutnya.

Sementara itu Direktur Produksi dan Teknologi PT. INKA

Yunendar Aryo Handoko menjelaskan 3 lokomotif prototipe saat ini sudah selesai. Didukung mesin dari Amerika dan *master controller* dari Korea Selatan kereta besi ini memiliki kelebihan dibanding lokomotif yang dimiliki PT. KAI saat ini.

“CC 300 masih dapat melaju dilokasi banjir, dengan mesin berkekuatan 2200 HP dan *turbo transmission* serta generator berdaya 380 VAC loko ini menghasilkan daya listrik se-

hingga tidak perlu lagi membawa kereta pembangkit untuk melayani penumpang,” jelasnya.

Saat ini menurutnya PT. INKA sedang mengembangkan bengkel lokomotif dengan kapasitas produksi 50 unit per tahun. Target produksi diproyeksikan dapat meningkat sampai dua kali lipat apabila seluruh bangunan selesai. (iky)

Pemerintah Harus Lebih Keras Dukung PT Inka



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V di depan bengkel PT INKA di Madiun, Jawa Timur.

Dalam banyak kesempatan baik di dalam maupun luar negeri PT. INKA sering berhadapan dengan banyak perusahaan asal Cina untuk memenangkan tender. Perusahaan BUMN ini sering kalah karena sedikit lebih mahal.

“PT INKA lebih mahal karena menggunakan mesin dari Amerika yang terkenal bandel dan awet, positifnya *life time* jelas lebih panjang. Itu sepadan dengan nilai jual yang sedikit lebih mahal,” kata anggota Komisi V Sigit Sosiantomo saat

berkunjung ke PT INKA di Madiun, Jawa Timur, Rabu (25/9/13).

Untuk menutupi hal ini pemerintah diminta lebih kuat mendukung industri ini dengan sejumlah paket kebijakan diantaranya dukungan fiskal penurunan bea masuk untuk komponen yang dibutuhkan, mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman dan memesan lebih banyak produk PT. INKA.

“Pemerintah harus lebih kuat men-

dukung, ini kadang beli kadang tidak. Kalau selisihnya lebih mahal beberapa puluh juta tetapi *life time*-nya tinggi ya tetap diambillah. Jangan berlindung dibalik aturan tender untuk mengalahkan perusahaan anak bangsa ini,” tandas Politisi FPKS ini.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V dalam kesempatan tersebut menyaksikan sejumlah produk PT. INKA yang telah diekspor ke sejumlah negara seperti kereta penumpang ke Bangladesh, *body con-*

tainer wagon dan blizzard center sils untuk Australia, well wagon ke Singapura dan Thailand.

“Bangsa kita bisa kok,” tegas Eriko Sotarduga anggota Komisi V dari FPDIP usai mencoba menaiki rangkaian kereta yang terdiri dari lokomotif dan gerbong produksi PT. INKA, berangkat dari Kota Solo menuju Madiun.

Sementara itu anggota Komisi V dari FPAN Hanna Gayatri meyakini keberhasilan PT INKA membuka optimisme kemajuan

perkeretaapian di tanah air. Salah satu harapan yang selalu di-suarakan wakil rakyat dari dapil Sumatera Selatan ini adalah segera terwujudnya jaringan kereta api Trans Sumatera.

“Dalam sejumlah rapat saya selalu menyuarakan agar ini jadi perhatian pemerintah jaringan kereta api Trans Sumatera harus jalan, demikian pula Trans Sulawesi. Kemajuan perkeretaapian di tanah air terbuka lebar. PT INKA harus mempersiapkan diri,” demikian Hanna. (iky)

Lima Fraksi Tolak Bahas RUU Pilpres

5 (Lima) Fraksi Besar di Badan Legislasi DPR RI yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Partai Golkar (F-PG), PDI Perjuangan (F-PDIP), Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menolak membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara Fraksi PKS, PPP, Gerindra dan Hanura menginginkan agar pembahasan RUU perubahan UU Pilpres dilanjutkan.

Hal tersebut mengemuka pada rapat pleno Baleg DPR RI dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Rabu (25/9), di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, dengan agenda tanggapan Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan UU Pilpres.

Juru bicara F-PD, Harry Wicaksono, yang diberikan kesempatan pertama menyampaikan pandangannya, menyatakan bahwa UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih layak dan relevan untuk digunakan pada pemilihan presiden 2014 mendatang.

“Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Pilpres karena masih relevan untuk digunakan pada Pilpres 2014,” kata Harry.

Sedangkan, Ali Wongso Halomoan Sinaga, juru bicara F-PG menyatakan bahwa tahapan pemilu 2014 sudah sangat mendesak dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres masih layak digunakan.

“FPG menolak pembahasan RUU Pilpres. Pertahankan syarat yang lama. UU Nomor 42 tahun 2008 masih relevan untuk digunakan pada Pilpres 2014. FPG ingin RUU Pilpres ditarik dari Program Legislasi Nasional,” tegas Ali Wongso. Senada dengan F-PG, juru bicara F-PDIP, Arif Wibowo menolak revisi UU Pilpres dan meminta revisi UU Pilpres ditarik dari Prolegnas 2013.

Menurutnya, UU Nomor 42 Tahun 2008 sekalipun akan dibahas atau direvisi, bisa dilakukan pada periode mendatang.

Juru bicara Fraksi PKS, Buchori Yusuf menyatakan, perlunya dilanjutkan pembahasan RUU Pilpres karena perlu



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono berjabat tangan dengan Anggota Baleg Ali Wongso Halomoan Sinaga.

perbaikan sistem dalam memilih pemimpin.

Abdul Malik Haramain, juru bicara F-PKB, menyatakan urgensi UU Pilpres tidak harus dengan melakukan perubahan.

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta dihentikannya pembahasan UU Pilpres dan ditarik dari Prolegnas,” ujar Abdul Malik Haramain.

Sementara, juru bicara F-PKS, Buchori, menyatakan perlunya dilanjutkan pembahasan RUU Pilpres karena perlu dilakukan perbaikan sistem dalam memilih pemimpin. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, kata Buchori, masih memiliki banyak kelemahan dan patut disempurnakan. Dari catatannya, ada 13 kelemahan UU Nomor 42 tahun 2008 tersebut. Tapi yang paling penting adalah *Presidential Threshold*.

Senada Buchori, Juru Bicara F-PPP, Ahmad Yani mengatakan, dilanjutkannya pembahasan RUU Perubahan UU Pilpres tak lain untuk menjalankan UUD 1945 dimana pada Pasal 6A ayat 2 tidak mencantumkannya syarat untuk mengusung calon presiden. (sc) Foto:odjie/parle.

KPI Diharapkan Lebih Mandiri dan Independen

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap bisa lebih mandiri dan independen melakukan kerjanya. Anggaran yang masih menumpang di Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga kantor yang menumpang di Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), membuat KPI tak leluasa menjalankan program kerjanya.

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima delegasi komisioner KPI, Rabu (25/9). Ketua KPI Yudhariksawan, mengatakan, selain ingin bersi-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Delegasi Komisioner KPI.

laturahmi memperkenalkan komisioner periode 2013-2016, KPI juga menyampaikan kendala-kendala di lapangan dan program kerja.

Kepada Priyo, Ketua KPI menginginkan agar anggaran KPI tidak lagi menumpang lewat anggaran Kemenkominfo.

Idealnya, KPI dapat mengajukan sendiri anggaran tahunan ke Komisi I langsung, tanpa melalui perantara Kemenkominfo. Untuk tahun 2014, anggaran KPI hanya sebesar Rp 28,6 miliar. Sudah 3 tahun berturut-turut anggarannya sebesar itu dan tak pernah bertambah. KPI berharap, ke depan anggarannya bisa ditambah.

“Anggaran sebesar itu antara hidup dan mati,” tutur Priyo. Ia berjanji akan membantu menambah anggaran KPI hingga mencapai jumlah ideal. Sementara soal kantor yang masih menumpang di lantai 1 BAPETEN, sedang diusahakan memiliki kantor sendiri. Independensi KPI juga diharapkan bisa terwujud seperti TVRI.

Yudha mengungkapkan, pada rapat terakhir dengan Komisi I DPR, tampaknya KPI belum bisa menjadi lembaga independen seperti TVRI yang sudah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. TVRI selain memiliki kantor sendiri, juga bisa mengajukan sendiri anggarannya.

Untuk itu, KPI mengajukan usulan perubahan atas UU Penyiaran yang lama kepada DPR. Dalam pertemuan itu, Ketua KPI juga menyampaikan bahwa KPI sedang menyusun standar kompetensi untuk para pekerja penyiaran. Ini penting, karena selama ini belum ada standarnya.

“Misalnya, untuk seorang direktur news. Kompetensi apa yang harus dimiliki, sehingga orang dapat menduduki jabatan tersebut. Ini, kan, tidak pernah ada aturannya. Tahun ini kami akan memulai menyusun standar kompetensi. Dengan begitu penyiaran akan menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermartabat,” kata Yudha. (mh)/foto:wahyu/parle/iw.

Keputusan Revisi UU Pilpres Ditunda Kembali

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/9) kembali menunda pengambilan keputusan dilanjutkan atau tidak pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Pasalnya, belum ada kata sepakat diantara Fraksi-fraksi di Baleg DPR RI. 5 fraksi meminta dihentikannya revisi UU Pilpres yakni, F-PD, F-PDIP, F-PG, F-PKB dan F-PAN. Sementara, 4 fraksi yaitu, F-PPS, F-PPP, F-Hanura dan F-Gerindra meminta dilanjutkan pemba-

hasan revisi UU Pilpres.

Rapat Pleno Baleg dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono akhirnya memutuskan untuk melakukan *lobby*.

Namun *lobby* yang dilakukan pimpinan Baleg dan wakil fraksi-fraksi berjalan buntu tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Menurut Mulyono, karena Fraksi-fraksi masih minta waktu untuk melaporkan kepada pimpinan fraksi dan partainya, maka pengambilan



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono.

keputusan revisi UU Pilpres ditunda, dan diagendakan kembali pada pada 3 Oktober 2013 mendatang. (sc)/foto:odjiej/parle/iw.

Dubes AS Yang Baru Datang ke Indonesia Bulan Depan

Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di ruang kerjanya Gedung DPR Senayan, Kamis (26/9) menerima kunjungan Ted Lyng yang menjabat *Political Conselor* Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Ted Lyng mengabarkan bahwa Dubes AS yang baru untuk Indonesia pada bulan Oktober akan datang ke Indonesia. Ia juga mengharapkan peningkatan hubungan dan kerja sama yang baik antara kedua negara termasuk antara DPR-RI dan DPR Amerika Serikat.

Menurut Pramono, sekarang Amerika Serikat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis terutama di bidang ekonomi dengan perubahan kebijakan politiknya. Hal itu membawa dampak yang cukup besar pada mata uang rupiah dan melemahnya indeks saham

“Karena itu kita tidak bisa menafikan bahwa kedudukan yang strategis itu juga penting bagi Indonesia,” ungkap Pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dalam pertemuan ini juga dibicarakan mengenai rencana Presiden China yang akan menyampaikan pidato di parlemen. Sidangnya tidak di ruang Sidang Paripurna tetapi di Ruang Pustaka Loka dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan China. Tradisi baru ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden-presiden ataupun Kepala Negara anggota G-20 tampil di depan di DPR, maka gilirannya berikutnya adalah Perdana Menteri India.

“Supaya tidak ada salah pengertian, karena bagaimanapun AS maupun China memiliki peran yang strategis di dunia internasional, maka kami sampaikan kepada pejabat dari Kedubes AS,” katanya.

Kepada Ted Lyng, Pramono juga menyampaikan, Presiden AS yang akan ke Indonesia menghadiri Sidang Apec di Bali,



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Political Conselor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Ted Lyng.

akan diberi kesempatan menyampaikan pidato di depan DPR. Kedatangan Presiden Obama yang lalu tidak menyampaikan pidato di DPR tetapi di UI, maka kali ini DPR akan memberikan kesempatan yang sama.

Menjawab pertanyaan mengenai alasan tidak di depan Sidang Paripurna, kata Pramono karena belum ada aturan tata tertibnya, juga di UU MD3. Di rapat paripurna tidak mudah mengontrolnya, manakala ada anggota DPR yang tiba-tiba interupsi, sebab kewenangan rapat paripurna ada pada anggota Dewan.

Dengan menempatkan di Ruang Pustaka Loka, maka yang hadir tidak hanya anggota DPR tetapi juga bisa mengundang anggota DPD, akademisi, media dan ini merupakan awal yang baik bagi DPR. DPR tidak semata-mata disibukkan dengan masalah korupsi, tetapi menjadi parlemen yang memberikan kesempatan kepada pimpinan dunia, dan yang pertama diberikan kepada Presiden China Xi Jinping. (mp)

Foto: iwan armanias/parle

Pemerintah Diminta Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Hasil Pertanian

Kedaulatan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rakyat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah diminta berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

“Sarana produksi mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari Fraksi Par-

tai Demokrat, saat memimpin RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan PT.Pupuk Indonesia. Selasa (24/9), di Gedung Nusantara, DPR RI.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian berdasarkan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 Rp.21,04 Triliun, yang terdiri dari Subsidi Pupuk sebesar

Rp.18,04 Triliun dan kekurangan bayar tahun 2012 sebesar Rp.3 Triliun.

Herman Khaeron mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, antara lain kualitas pupuk, harga di atas HET, hingga kelangkaan pupuk. “Komisi IV memandang masih banyak permasalahan-permasalahan dalam penyaluran dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” katanya. DPR RI bersama Pemerintah telah

memfasilitasi penyediaan subsidi pupuk untuk pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya. Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.

“Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kondisi kemampuan permodalan petani sangat terbatas



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

dalam membiayai kebutuhan usaha taninya,” ungkap Herman Khaeron

Namun demikian, dia menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan seperti kualitas pupuk, Harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga kelangkaan pupuk. “Dalam rangka memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV telah membentuk panja pupuk dari tahun 2011,” papar Herman Khaeron. (as)/foto:wahyu/parle/iw.

Kendala Transportasi Perlu Diantisipasi Dalam Berhaji

Transportasi masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut terungkap dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Dirjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Rabu (25/9).

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Nurul Imam Mustofa yang paling banyak dan sering terjadi adalah keterlambatan pesawat. “Bagaimana caranya agar pesawat yang membawa Jamaah calon haji tidak *delay*,” ujar Nurul Imam.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ledia Hanifa, anggota

Komisi VIII Humaidi mengatakan, keterlambatan dari pesawat atau *delay* nya pesawat yang akan membawa jamaah calon haji bisa mengganggu kesiapan jamaah dalam menjalankan ibadah hajinya. Jika hal tersebut tetap terjadi hal lain yang harus dipersiapkan adalah ketersedianya fasilitas dalam ruang tunggu. Dengan adanya fasilitas yang memadai akan mengurangi kekecewaan para jamaah calon haji.

Sementara itu menurut Nurul Imam, selain masalah transportasi udara, yang juga harus mendapat perhatian lebih adalah transportasi di Arab saat menjalankan ibadah haji.



Anggota Komisi VIII DPR Nurul Imam Mustofa.

“Transportasi perlu diperhatikan, salah satunya mengantisipasi bus mogok saat di Arab. Mengingat jumlah jamaah calon haji tidak sedikit, jika bus mogok tentu akan sangat mengganggu,” jelas politisi dari Fraksi Demokrat. (Ayu) Foto: rizka/parle.

DPR Harapkan OJK Dikenal Masyarakat

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi pada tahun 2013. Direncanakan, pada awal tahun mendatang, secara resmi OJK mengemban tugas pengawasan, limpahan dari Bank Sentral. Namun, ternyata belum banyak pihak yang mengetahui keberadaan lembaga yang dipimpin oleh Muliaman D Hadad ini.

Hal itu dirasakan oleh Anggota Komisi XI Linda Megawati. Politisi Demokrat ini menilai OJK belum diketahui masyarakat luas. Ia berharap, OJK dapat lebih dikenal.



Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam.

“Saya berharap OJK lebih dikenal. Dengan adanya OJK, Saya berharap keuangan negara makin akuntabel. Selain itu, jika ada kantor cabang di daerah juga dapat mendukung untuk masyarakat di daerah,” ujar Linda saat rapat dengan Dewan Komisiner OJK di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kamis (26/09).

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam. Politisi PKS ini menyatakan, jika OJK berjalan sukses, maka akan memperkuat sistem keuangan Indonesia. Selain itu, Komisi XI sudah cukup panjang membahas undang-undang OJK,

sehingga ini merupakan bentuk dukungan kepada OJK.

“Saya ingin tahu, bagaimana dukungan dari pemerintah dalam mensupport OJK, paling tidak dalam masa transisi sampai dengan tahun 2016 ini, kira-kira terpenuhi tidak. Seperti kebutuhan untuk gedung, SDM, maupun kebutuhan infrastruktur lain, sehingga tidak terjadi resiko operasional dan tidak tercapainya tujuan dari pembentukan OJK ini,” ujar Ecky.

Walaupun Ecky yakin dengan visi dan misi yang diusung OJK, namun ia tetap khawatir dengan kinerja yang diem-

bannya. Ia khawatir nanti OJK disibukkan dengan hal-hal yang sesungguhnya bukan menjadi kebijakan, sehingga malah tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk mencapai kinerja visinya.

“Saya ingin tahu, minimal selama masa transisi dalam tiga tahun ini, bisa dijamin bahwa memang OJK itu bisa eksis dan tercapai visi misinya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang. Saya yakin teman-teman Komisi XI khususnya akan mendukung itu, termasuk juga Menteri Keuangan dan BI. Nanti kita support dan kawal,” janji Politisi asal Dapil Jabar III ini. (sf)Foto: odjie/parle.

Kejahatan Kian Terorganisir dan Meresahkan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Delegasi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI).

Kejahatan yang mengancam warga sipil hingga kasus mutakhir berupa penembakan terhadap aparat kepolisian kian terorganisir dan meresahkan masyarakat. Kebutuhan terhadap organisasi atau lembaga pencegah kejahatan jadi keniscayaan di tengah masyarakat.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dengan delegasi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), Kamis (26/9). Organisasi yang termasuk baru ini diawaki para purnawirawan Polri. Mantan Kapolri Da'i Bachtiar menjadi Ketua Presidium LCKI. Mantan Kapolri Awaloeddin Djamin menempati posisi Dewan Pakar LCKI. Sementara Ketua

Hariannya adalah I Ketut Astawa.

Perbincangan seputar dunia kejahatan cukup menarik. Priyo bahkan sempat mengusulkan agar LCKI yang sementara ini masih berupa LSM, mungkin suatu saat nanti bisa menjadi lembaga negara. Sehingga bisa didanai lewat anggaran resmi negara. LCKI sendiri sedianya hanya berdiri di Jakarta. Namun, dalam perkembangannya banyak daerah juga meminta agar membuka cabang di setiap daerah.

Organisasi yang konsen mencegah kejahatan ini, di tingkat Asia Pasifik justru sudah berkembang pesat. Pusat organisasi globalnya ada di Tokyo, Jepang. Sementara di PBB, lembaga

seperti LCKI ini menjadi konsultan yang khusus memberi pandangan dan arahan seputar kejahatan transnasional. Termasuk dalam bidang kejahatan ini adalah terorisme.

“Tadi kita diskusi panjang lebar tentang banyak hal terutama mengenai keprihatinan kita terhadap maraknya berbagai kejahatan baru, masalah terorisme, masalah ancaman keamanan dan ketertiban umum, termasuk ada beberapa penembakan pada prajurit-prajurit kepolisian kita,” kata Priyo usai pertemuan.

Sementara itu Da'i Bachtiar dalam pertemuan tersebut mengemukakan, dirinya dan para purnawirawan lainnya ingin membaktikan diri, menyumbangkan pikiran dan gagasan terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan pengalaman kerja di kepolisian, tentu ada sumbangsih nyata yang bisa dilakukan lewat organisasi ini. Katanya, bila dulu saat aktif di Polri lebih banyak melakukan tindakan, kini lebih banyak melakukan pencegahan terhadap bahaya kejahatan. (mh)/foto:iwan armanias/parle.



Suasana lobi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan Timwas Century, di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (25/09) Foto:Wahyu/Parle.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berbincang dengan mitra kerja Komisi IV di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (24/09) Foto: Wahyu/Parle.



Suasana pemungutan suara untuk memilih 4 calon Hakim Agung di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (23/09) Foto: Rizka, Wahyu/Parle.



Anggota Komisi VI Hendrawan Supratikno, Pengamat Andrinof Chaniago dan Darmaningtyas dalam Dialektika Demokrasi membahas mobil murah, di Press Room, Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (26/09) Foto: Wahyu/Parle.

